



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711  
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666  
surel: dinkes\_kapuashulu@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Dinas Kesehatan diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
  - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan
  - b. Perencanaan Tahunan Dinas Kesehatan
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal, 5 Februari 2020



Abang Muhammad Nasir, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630602 198603 1 018

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS KESEHATAN

### INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

- 1 Jabatan : Sekretaris
- 2 Tugas pokok : membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
- 3 Fungsi :
  - 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
  - 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
  - 3) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
  - 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
  - 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
  - 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya kelengkapan dokumen SAKIP	persentase penyusunan dokumen-dokumen SAKIP tepat waktu	Jumlah Dokumen SAKIP yang dikumpulkan tepat waktu	Dokumen SAKIP
			Jumlah Dokumen SAKIP	
2	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perkantoran	Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor	Hasil Survey Internal Kantor	Kuisisioner
3	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pemenuhan peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dikembangkan	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

- 1 Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- 2 Tugas pokok : membantu Kepala Dinas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan gizi dan promosi dan pemberdayaan masyarakat
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - 2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang ibu, anak, remaja dan lanjut usia, gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 4) pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 5) penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 6) pembinaan program dan kegiatan di bidang pelayanan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 7) pengendalian program dan kegiatan di bidang pelayanan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, gizi keluarga dan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 8) pengaturan pelaksanaan tugas Seksi – Seksi pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - 9) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat secara periodik; dan
  - 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	Setiap ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar : 1. Standart Kuantitas adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan 2. Standart Kualitas adalah pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar  Jumlah Sasaran ibu hamil dalam satu wilayah	  x 100	Laporan Bulanan
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, meliputi : 1. Persalinan Normal (faskes) 2. Persalinan Komplikasi	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar  Jumlah Sasaran ibu bersalin dalam satu wilayah	  x 100	Laporan Bulanan
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita dan anak usia pendidikan dasar	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi : kuantitas adalah kunjungan minimal sebanyak 3 kali kunjungan periode neonatal, KN 1 = 4-48 jam, KN 2 = 3-7 hari, KN 3 = 8 – 28 hari Standar kualitas : pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  Jumlah Sasaran bayi baru lahir dalam satu wilayah	  x 100	Laporan Bulanan

			6 jam ) dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir ( 6jam-28 hari )			
		Persentasi balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap Balita yang berusia 0 – 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang terdiri dari pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	x 100	Laporan Bulanan
				Jumlah Sasaran balita dalam satu wilayah		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar 7-15 tahun baik didalam satuan pendidikan formal maupun di luar satuan pendidikan formal mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi : skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	x 100	Laporan Bulanan
				Jumlah Sasaran anak Usia Pendidikan Dasar dalam satu wilayah		
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar 7-15 tahun baik didalam satuan pendidikan formal maupun diluar satuan pendidikan formal mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi : skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	x 100	Laporan Bulanan
				Jumlah usia 60 tahun keatas dalam satu wilayah		

4	Menurunnya persentase balita kurus (wasting) dan balita gizi kurang (underweight)	Persentase balita kurus (wasting)	Proporsi kasus balita sangat kurus dan balita kurus (indeks BB/TB dengan nilai z-Score <-3SD dan -3SD s/d <-2SD) terhadap jumlah seluruh balita yang diukur disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah balita kurus (wasting)	x 100	Laporan
				Jumlah Sasaran balita dalam satu wilayah		
		Persentase balita gizi kurang (underweight)	Proporsi kasus balita gizi buruk dan gizi kurang (indeks BB/U dengan nilai z-Score <-3SD s/d <-2SD) terhadap jumlah seluruh balita yang diukur disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah balita gizi kurang (underweight)	x 100	Laporan
				Jumlah Sasaran balita dalam satu wilayah		
5	Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	cakupan keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat	Keluarga yang memenuhi kriteriai indeks Keluarga Sehat ( IKS ) dengan nilai lebih dari 0,8	jumlah keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat	x 100	Laporan PIS-PK
				Jumlah Keluarga dalam satu wilayah		

- 1 Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
- 2 Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
- 3 Fungsi :
  - 1) Penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengawasan makanan dan minuman, Pengelolaan farmasi, pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan makanan dan minuman, pengelolaan farmasi, pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - 4) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan makanan dan minuman, pengelolaan farmasi, pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - 5) Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengawasan makanan dan minuman, pengelolaan farmasi, pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - 6) Pembinaan program dan kegiatan di bidang pengawasan makanan dan minuman, pengelolaan farmasi, pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - 7) Pengendalian program dan kegiatan di bidang pengawasan makanan dan minuman, pengelolaan farmasi, pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - 8) Pengaturan pelaksanaan tugas Seksi – Seksi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - 9) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan secara periodik; dan
  - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar		Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan Dasar}} \times 100$	Data Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar		Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan Rujukan}} \times 100$	Data Sarana dan Prasarana
3	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana aparatur}} \times 100$	Data Sarana dan Prasarana
4	Meningkatnya kompetensi aparatur kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan	Persentase pemenuhan aparatur kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar		Persentase pemenuhan aparatur kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	$\frac{\text{jumlah aparatur kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar}}{\text{jumlah aparatur kesehatan}} \times 100$	Data aparatur
5	Meningkatnya ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten	Persentase tersedianya 143 item obat di Instalasi Farmasi Kabupaten	Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar pada suatu wilayah kerja tertentu	Persentase tersedianya 143 item obat di Instalasi Farmasi Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah obat indikator yang tersedia}}{\text{Jumlah obat indikator yang tersedia}} \times 100$	Laporan

					Jumlah obat indikator	
6	Meningkatnya penerapan penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	Persentase penerapan penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode waktu tertentu. Indikator penggunaan obat yang rasional terdiri dari : 1. Rerata jumlah item dalam tiap resep 2. Persentase peresepan dengan nama generik 3. Persentase peresepan dengan antibiotik 4. Persentase peresepan dengan suntikan	Persentase penerapan penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang menerapkan POR di puskesmas}}{\text{Jumlah Puskesmas keseluruhan}} \times 100$	Laporan
7	Menurunnya angka kejadian keracunan akibat obat dan makanan	Angka kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan	Keracunan makanan adalah masalah pencernaan akibat konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau parasite.	Angka kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan	Angka Kejadian keracunan akibat Obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kapuas Hulu	Laporan

- 1 Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 2 Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - 2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan;
  - 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan;
  - 4) pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan;
  - 5) penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan;
  - 6) pembinaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan;
  - 7) pengendalian program dan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan;
  - 8) pengaturan pelaksanaan tugas Seksi –Seksi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - 9) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara periodik; dan
  - 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase penderita TB Paru yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang terduga Tuberkulosis dengan penegakan diagnosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis serta pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan Tuberkulosis (register 06)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Laporan
				Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	
2	Meningkatnya pemeriksaan HIV sesuai standar pada orang yang berisiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV) yang meliputi: skrining dilakukan dengan pemeriksaan RDT HIV minimal 1 kali dalam setahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Laporan
				Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	

3	Menurunnya Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kejadian Luar Biasa $\leq 1$ kasus	Kegiatan surveilans dalam penemuan suatu kasus yang dilakukan PE (penyelidikan Epidemiologi), untuk dapat dilakukan tindakan Pencegahan dan Penanggulangan suatu kasus penyakit agar tidak menjadi KLB/Wabah	Jumlah Kejadian KLB	Laporan	
4	Meningkatnya Jumlah penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan.	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x100	Laporan
				Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.		
5	Meningkatnya penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus yang mendapatkan	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan	Setiap penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di	Jumlah penyandang Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x100	Laporan

	pelayanan kesehatan sesuai standar	kesehatan sesuai standar	wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan. Tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi			
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai	Jumlah penyandang Hipertensi berdasarkan angka prevalensi Hipertensi nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama		
				Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x100	Laporan

			standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	
7	Meningkatnya desa yang melaksanakan STBM	Persentase desa yang melaksanakan STBM		Jumlah Desa yang melaksanakan STMB	x100
				Jumlah seluruh desa	
					Laporan

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, kesehatan tradisional, kesehatan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan

Fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;

- 4) pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- 5) penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- 6) pembinaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- 7) pengendalian program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- 8) pengaturan pelaksanaan tugas Seksi – Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 9) pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan secara periodik; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	kunjungan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam suatu wilayah yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk miskin dalam satu wilayah}} \times 100$	Laporan

2	Tercapainya jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Seluruh peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Laporan
3	Meningkatnya Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif	Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif	jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif dibagi dengan jumlah sasaran keluarga pada suatu wilayah	$\frac{\text{jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif}}{\text{Jumlah sasaran keluarga}} \times 100$	Laporan
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	Terakreditasi nya Rumah sakit pada suatu wilayah	Hasil Akreditasi	KARS
5	Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Terakreditasi nya Puskesmas pada suatu wilayah	Hasil Akreditasi	Komisi Akreditasi FKTP

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS KESEHATAN

### INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

- 1 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program
- 2 Tugas pokok : membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas.
- 3 Fungsi : 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;  
 2) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;  
 3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;  
 4) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;  
 5) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;  
 6) penyusunan profil kesehatan;  
 7) pengelolaan sistem informasi kesehatan dan pemberian layanan data bidang kesehatan;  
 8) pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;  
 9) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan  
 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Dokumen perencanaan	persentase Dokumen perencanaan kinerja dan	Kinerja dan Anggaran yang dibuat secara akurat berdasarkan pedoman	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun x 100	Dokumen Perencanaan

	kinerja dan anggaran	anggaran yang disusun	yang berlaku	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran	
2	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal	Sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Komdat yang dilaporkan tepat waktu</li> <li>- Profil Kesehatan yang disusun tepat waktu</li> <li>- Satu data kesehatan</li> <li>- Publikasi melalui website Dinas</li> <li>- Keterbukaan informasi Publik</li> </ul>	$\frac{\text{jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal}}{\text{jumlah data dan informasi kesehatan}} \times 100$	Data Informasi
3	Tercapainya target kinerja SKPD	Persentase target kinerja yang dievaluasi	Penilaian Kinerja berkala yang dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah target kinerja yang dievaluasi}}{\text{Jumlah target kinerja}} \times 100$	Hasil evaluasi

- 1 Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- 2 Tugas pokok : membantu Sekretariat di bidang pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
  - 2) penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
  - 3) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
  - 4) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
  - 5) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
  - 6) pelaksanaan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pelaporan Keuangan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	Dokumen Pelaporan
2	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi oleh petugas bendahara puskesmas tepat waktu dan benar	Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar	Puskesmas yang melaksanakan program sesuai standar dengan nilai Ceklist minimal 80%	Puskesmas dengan ceklist 80% benar	Hasil Ceklist
3	Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	Persentase Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat beroperasi dengan maksimal	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat beroperasi dengan maksimal	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang beroperasi dengan maksimal x 100	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

		Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	
--	--	----------------------------------------------	--

- 1 Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
- 2 Tugas pokok : membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, administrasi umum dan perlengkapan Dinas.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Personil dan Umum;
  - 2) penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - 3) penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah bagi tenaga non kesehatan;
  - 4) penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang aparatur;
  - 5) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan Dinas serta pembinaan produk hukum di lingkungan dinas;
  - 6) pengelolaan barang dan perlengkapan milik Dinas;
  - 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	x 100	Laporan Habis Pakai
				Jumlah kebutuhan alat tulis kantor		
2	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan jasa penggandaan	jumlah barang cetakan dan jasa penggandaan yang tersedia	x 100	Laporan
				jumlah kebutuhan barang cetakan dan jasa penggandaan		
3	Meningkatnya Pelayanan jasa surat menyurat internal	persentase surat menyurat yang dapat diselesaikan	Pelayanan surat menyurat internal yang dapat diselesaikan	jumlah surat menyurat yang dapat diselesaikan	x 100	Laporan Surat Menyurat Dinas
				jumlah seluruh surat menyurat		
4	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar	Ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar	x 100	Laporan Rekening Listrik dan Air
				Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
5	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Persentase pembayaran pajak kendaraan dinas kesehatan tepat waktu	persentase kendaraan operasional yang	jumlah pajak kendaraan dinas kesehatan yang di bayar tepat waktu	x 100	Laporan

	Dinas Kesehatan Tepat Waktu		dibayar pajak tepat waktu	jumlah pajak kendaraan dinas kesehatan		
6	Terpenuhinya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan	persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan	Jumlah insentif tenaga pengelola Keuangan yang dibayar	x 100	Daftar Insentif
				Jumlah tenaga pengelola Keuangan		
7	Terpenuhinya Jasa Tenaga Pengamanan dan Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas	persentase tersedianya petugas jasa kebersihan dan pengamanan kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	jumlah petugas jasa kebersihan dan pengamanan kantor	x 100	Daftar Petugas Kebersihan dan Pengamanan
				jumlah kebutuhan petugas jasa kebersihan dan pengamanan kantor		
8	Berfungsinya Peralatan Kerja Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se Kapuas hulu Secara Optimal	persentase ketersediaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	persentase ketersediaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	jumlah peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	x 100	Kartu Inventaris
				jumlah peralatan kerja di Dinas		
9	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik	persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik	jumlah peralatan dan instalasi listrik yang tersedia	x 100	Laporan
				Jumlah kebutuhan peralatan dan instalasi listrik		
10	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan	persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang diadakan	x 100	Laporan

		Perundang - Undangan	Perundang – Undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		
11	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu	persentase penyediaan makan dan minum kantor	persentase penyediaan makan dan minum kantor	jumlah makan dan minum kantor yang diadakan	x 100	Data makan dan minum
				jumlah kebutuhan makan dan minum kantor		
12	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia	x 100	Kartu Inventaris
				jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja		
13	Terlaksananya Koordinasi dan Kunjungan Kerja Keluar Daerah	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dibiayai	x 100	Data Kepesertaan Pegawai
				jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		
14	terlaksananya kegiatan Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Ahmad	Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Ahmad diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun	Persentase ketersediaan jasa publikasi	Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Ahmad diponegoro		Data Publikasi

	diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun				
15	Terlaksananya Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	$\frac{\text{jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dibiayai}}{\text{jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah}} \times 100$	Data Kepesertaan Pegawai
16	Terpenuhinya kebutuhan terhadap jasa pendukung kantor	persentase pembayaran jasa tenaga pendukung kantor	Ketersediaan kebutuhan terhadap jasa pendukung kantor	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kontrak yang di gaji}}{\text{Jumlah tenaga kontrak di Dinas Kesehatan}} \times 100$	Daftar gaji Kontrak
17	Berfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit	Jumlah Sistem Penilaian Angka Kredit yang berfungsi	Sistem Penilaian Angka Kredit berfungsi dengan maksimal	Jumlah Sistem Penilaian Angka Kredit	Sistem Penilaian Angka Kredit

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.
- 3 Fungsi : 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;  
 2) penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan tenaga kesehatan, sumber daya manusia, dan organisasi profesi kesehatan ;  
 3) pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;  
 4) penyusunan perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan dan standarisasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan;  
 5) perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik;  
 6) pelaksanaan kegiatan penilaian, pengembangan dan pelayanan administrasi ketenagaan bagi tenaga kesehatan;  
 7) pelayanan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;  
 8) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan tenaga kesehatan;  
 9) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan  
 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
----	---------	-------------------	----------------------	-----------------------------------	-------------

1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kesehatan	Persentase aparatur kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan	Aparatur kesehatan yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM sesuai kebutuhan	$\frac{\text{aparatur kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur kesehatan}} \times 100$	Data kepegawaian
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat dan fasyankes	$\frac{\text{Jumlah tenaga kontrak di fasyankes}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes}} \times 100$	Data Kepegawaian
3	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendayagunaan tenaga kesehatan	Persentase pemenuhan Kebutuhan tenaga kesehatan	Pemerataan tenaga kesehatan dan disiplin tenaga kesehatan sesuai aturan yang berlaku	$\frac{\text{jumlah tenaga kesehatan yang tersedia}}{\text{jumlah kebutuhan tenaga kesehatan}} \times 100$	Data kepegawaian

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas dan Alat Kesehatan
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitas dan Alat Kesehatan;
  - 2) penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan fasilitas dan alat kesehatan;
  - 3) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan sarana prasarana di fasilitas kesehatan;
  - 4) penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - 5) pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
  - 6) penyediaan dan pemantauan pemanfaatan alat kesehatan;
  - 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas dan Alat Kesehatan; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Kendaraan roda 4 dan speedboat yang diservice	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan operasional yang dipelihara}}{\text{Jumlah Kendaraan operasional}} \times 100$	Laporan
2	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	$\frac{\text{jumlah gedung kantor yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah kebutuhan gedung kantor}} \times 100$	Data Sarana dan Prasaran
3	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	$\frac{\text{Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki}}{\text{Jumlah Peralatan Gedung Kantor}} \times 100$	Laporan
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Gudang	Jumlah gudang yang disewa	Jumlah gedung/rumah/ruko yang disewa	Jumlah gudang yang disewa	Gudang yang disewa
5	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	Jumlah Gedung IFK yang direhabilitasi	Jumlah gedung IFK yang direhabilitasi	Jumlah Gedung IFK yang direhabilitasi	Gedung IFK

6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik	Jumlah KWH meter yang dipasang baru, tambah daya dan diperbaiki instalasi listriknya	Jumlah pengadaan peralatan dan instalasi listrik	x 100	Data Sarpras
				Jumlah kebutuhan peralatan dan instalasi listrik		
7	Terlaksananya Peningkatan /Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayan Kesehatan Dasar	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang direhabilitasi/dibangun	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	X 100	Data Sarpras
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang tersedia		
8	Terlaksananya Peningkatan /Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan rujukan	Jumlah Rumah Sakit yang direhabilitasi / dibangun	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan	X 100	Data Sarpras
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan yang tersedia		
9	Tersedianya Biaya Operasional Rumah Sakit	Persentase Tersedianya Biaya Operasional Rumah Sakit	Kebutuhan Operasional Rumah Sakit yang tersedia	Jumlah kebutuhan operasional rumah sakit	X 100	Laporan
				Jumlah operasional yang tersedia		

1 Jabatan : Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kefarmasian dan pengawasan makanan dan minuman.
- 3 Fungsi : 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;  
2) penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kefarmasian dan pengawasan makanan dan minuman;  
3) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan obat dan pengawasan makanan dan minuman;  
4) pelaksanaan pengelolaan obat meliputi meliputi penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemantauan, dan pelaporan;  
5) pengawasan pemanfaatan obat pada institusi kesehatan dan masyarakat;  
6) penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;  
7) penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);  
8) penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;  
9) pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga;  
10) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman; dan  
11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersediannya obat esensial di puskesmas	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator). Laporan yang dimasukkan yaitu laporan pada bulan terakhir pada tahun/triwulan pelaporan.	Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas	Laporan
				$\frac{\text{Jumlah (n) Puskesmas yang melapor} \times \text{Jumlah total item obat indikator}}{\text{X 100}}$	
2	Terlaksananya distribusi obat ke puskesmas	Persentase Puskesmas yang mendapatkan Distribusi Obat	Distribusi obat ke Puskesmas dilakukan setiap triwulan. Setiap Puskesmas dialokasikan 4 kali distribusi per tahunnya.	Jumlah Puskesmas yang telah didistribusikan obatnya	Laporan
				$\frac{\text{Jumlah Puskesmas} \times 4 \text{ kali}}{\text{X 100}}$	
3	Terlaksananya konfirmasi data obat per 31 Desember secara lengkap	Persentase Puskesmas dan RS Kelas D Pratama yang telah menyelesaikan konfirmasi data persediaan obat per 31 Desember dengan lengkap	Untuk mengetahui jumlah persediaan yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten dan yang berada di Puskesmas dan Rumah Sakit Bergerak maka dilakukan <i>stock opname</i> persediaan	Jumlah Puskesmas dan RSB yang datanya terkonfirmasi	Laporan

			<p>obat-obatan dan bahan medis habis pakai per 31 Desember. Jumlah persediaannya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sebagai masukan untuk Laporan Keuangan akhir periode akuntansi. Data <i>stock opname</i> juga memastikan kesesuaian dengan data kartu stok dan LPLPO di Puskesmas.</p>	Jumlah puskesmas dan RSB yang terkonfirmasi	
4	Tersedianya sarana pendukung pelayanan kefarmasian	Persentase tersedianya sarana pendukung pelayanan kefarmasian	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian dimaksudkan untuk mendukung kegiatan dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat essential generik dan bahan medis habis pakai di Instalasi farmasi Kabupaten	jumlah sarana pendukung pelayanan kefarmasian yang diadakan X 100	Laporan

				jumlah sarana pendukung pelayanan kefarmasian yang diusulkan	
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan Obat Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80 % benar	<p>Monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan obat puskesmas terdiri dari monitoring :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Kefarmasian</li> <li>b. Persediaan Obat di Gudang</li> <li>c. Persediaan Obat di Apotek</li> <li>d. Persediaan Obat Narkotika dan Psikotropika</li> <li>e. Persediaan Vaksin</li> <li>f. Pengelolaan Vaksin</li> </ol> <p>Permasalahan dari setiap blanko monitoring tersebut dituangkan di dalam daftar permasalahan dan dilakukan kesepakatan bersama untuk tindak lanjut.</p>	Jumlah Puskesmas yang telah di Monev	Hasil checklist

6	Terlaksananya penyuluhan, pemeriksaan dan pengawasan makanan	Persentase IRTP yang dilakukan penyuluhan, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan makanan	Banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan yang dilakukan penyuluhan, pembinaan, pemeriksaan atau pengawasan makanan	Jumlah IRT pangan yang diperiksa dan diawasi	X 100	Laporan
				Jumlah IRT yang telah mendapatkan Nomor PIRT		
				Jumlah peserta		
7	Terlaksananya Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat	Persentase sarana kefarmasian dan obat tradisional yang dilakukan perizinan, pembinaan, pengawasan	Banyaknya sarana kefarmasian yang terdiri dari apotek atau toko obat yang dilakukan pengecekan sarana untuk pembuatan pertimbangan teknis untuk perizinan baru serta pembinaan dan pengawasan untuk apotek dan toko obat yang sudah memiliki izin operasional.	Jumlah sarana kefarmasian dan obat tradisional yang dilakukan perizinan, pembinaan, pengawasan	X 100	Laporan
				Jumlah sarana kefarmasian dan obat tradisional yang mempunyai izin		
8	Terlaksananya kegiatan E-Logistik	Persentase Peserta Pertemuan dengan nilai Post test 80% benar	Peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM dengan nilai post test minimal 80 % benar	Jumlah Peserta Pertemuan dengan nilai Post test 80% benar	X 100	Laporan
				Jumlah Peserta Pertemuan		

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga;
  - 2) penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;
  - 3) penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia;
  - 4) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia;
  - 5) pengumpulan dan pengolahan data perkembangan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia;
  - 6) pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia;
  - 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya sistem rujukan kasus kebidanan	Persentase Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani	Kasus rujukan emergency kebidanan dari pustu/ polindes/ puskesmas yang memerlukan penanganan khusus antara lain ketersediaan darah dan atau bantuan pengurusan administrasi.	$\frac{\text{Jumlah Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani}}{\text{Jumlah Seluruh Kasus Rujukan}} \times 100 \%$	Laporan Bulanan
2	Terlaksananya Audit Maternal dan Perinatal (AMP)	Persentase Kematian Ibu dan Bayi yang Dilakukan Audit	Penelusuran sebab kematian ibu, perinatal, neonatal	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dan bayi yang dilakukan audit}}{\text{Jumlah seluruh kasus}} \times 100\%$	Hasil Post Test

			yang terdiri dari OVP/OPM, dan atau RMP/RMM dan atau RMPP/RMMP.	Jumlah seluruh kematian ibu dan bayi	
3	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita	Jumlah Produk Hukum tentang Kesehatan Keluarga	Produk hukum yang telah ditandatangani dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah/Pearaturan Bupati dan atau Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM dengan nilai post test minimal 80 % benar	Jumlah Produk Hukum tentang Kesga yang diterbitkan	Perda
4	Terlaksananya pertemuan orientasi Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM dengan nilai post test minimal 80 % benar	Peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM dengan nilai post test minimal 80 % benar	Jumlah peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar	Perda
				Jumlah seluruh peserta pelatihan	
5	Terlaksananya monitoring, evaluasi	Persentase Puskesmas dengan	Puskesmas yang melaksanakan	Jumlah Puskesmas dengan checklist 80% benar	Hasil Cheklist

	dan bimbingan teknis program kesehatan ibu dan anak	checklist Pelaksanaan Program 80% Benar	program sesuai standar dengan nilai checklist minimal 80		
				Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu	

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Kesehatan Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 2) menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan;
  - 4) fasilitasi kemitraan kesehatan;
  - 5) penyebarluasan informasi kesehatan;
  - 6) menyiapkan sarana dan prasarana promosi kesehatan;
  - 7) pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan;
  - 8) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat; dan

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk	Seluruh UKBM yang di bentuk dan di bina di wilayah kerja masing-masing Puskesmas dan UKBM yang di bina oleh Dinas Kesehatan bersama lintas sektor lainnya.	Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk	Laporan Promkes
2	Terlaksanya Kegiatan Promosi Kesehatan	Persentase Penyebarluasan Media Informasi dan Alat Promosi Kesehatan	Seluruh bentuk penyebarluasan informasi yang terdiri dari, penyuluhan kesehatan, siaran radio, media sosial, bahan cetak untuk promosi kesehatan dan <i>stand</i> Promosi Kesehatan yang tergabung dalam suatu <i>event</i> .	$\frac{\text{Jumlah Media Informasi dan Alat Promosi Kesehatan yang tersedia}}{\text{Jumlah Media Informasi dan Alat Promosi Kesehatan yang disebarluaskan}} \times 100$	Laporan Promkes

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Gizi
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perbaikan gizi.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Gizi;
  - 2) penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perbaikan gizi;
  - 3) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
  - 4) pengumpulan data dan pengolahan data perkembangan gizi keluarga, institusi, dan, masyarakat;
  - 5) penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
  - 6) penyelenggaraan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
  - 7) pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat;
  - 8) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi;
  - 9) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Gizi; dan

10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi status gizi	Jumlah puskesmas yang melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita dalam tahun berjalan	Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi status gizi	Laporan Gizi
2	Terlaksananya kegiatan pemberian tambahan makanan dan minuman	Persentase Balita gizi buruk yang di rawat yang meningkat status gizi	Proporsi kasus balita dengan tanda klinis gizi buruk dan atau gizi buruk (indeks BB/PB atau BB/TB dengan nilai	Jumlah Balita gizi buruk yang di rawat yang meningkat status gizi $\frac{X}{100}$	Laporan PRGB

			z-score <-3SD) yang dirawat inap di Pusat Rehabilitasi Gizi Buruk (PRGB) yang meningkat status gizinya terhadap jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat	Jumlah Balita gizi buruk yang di rawat	
3	Terlaksananya monitoring evaluasi dan bimbingan teknis program gizi di puskesmas	Jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80% benar	Jumlah petugas gizi puskesmas yang dibimbing dan meningkat pemahamannya berdasarkan checklist program 80% benar	Jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80% benar	Laporan Gizi
4	Terlaksananya kegiatan pelatihan asuhan gizi puskesmas	Persentase peserta pelatihan dengan post test 80% benar	Proporsi peserta pelatihan menjawab minimal 80% benar pada akhir pelatihan terhadap jumlah seluruh peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan dengan post test 80% benar	Laporan Gizi
				$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan dengan post test 80\% benar}}{\text{Jumlah peserta pelatihan}} \times 100$	
5	Terlaksananya kegiatan pelatihan konselor menyusui Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase peserta pelatihan dengan post test 80% benar	Proporsi peserta pelatihan menjawab minimal 80% benar pada akhir pelatihan terhadap jumlah seluruh peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan dengan post test 80% benar	Laporan Gizi
				$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan dengan post test 80\% benar}}{\text{Jumlah peserta pelatihan}} \times 100$	

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 2 Tugas pokok : membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian imunisasi, pelaksanaan surveilans sebagai upaya pencegahan penyakit, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - 2) penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit Menular;

- 3) pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotik;
- 4) pelaksanaan kegiatan Imunisasi, pendataan *Early Warning Alert and Response System (EWARS)* dan surveilans penyakit menular yang berpotensi wabah;
- 5) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
- 6) pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, termasuk pemberantasan penyakit menular yang bersumber binatang;
- 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya kegiatan Imunisasi	Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Setiap Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Posyandu Bayi 0-11 Bln meliputi	Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) X 100	Laporan

			pemberian HBO (1 dosis),BCG(1 dosis), DPT-HB-Hib (3 dosis),Polio (4 dosis) dan MR (1 dosis)	Jumlah Sasaran bayi dalam kurun 1 tahun	
2	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemcegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Puskesmas degan ceklist pelaksanaan program 80% benar	Setiap Pemegang program Penyakit Menular yang dilaksanakan monev mendapatkan nilai didaftar ceklis 80%	Jumlah Puskesmas degan ceklist pelaksanaan program 80% benar	Laporan
3	Terlaksananya Kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	Persentase Kasus yang dilakukan Survei Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kegiatan Surveilans yang meliputi penemuan kasus yang dilakukan PE (penyelidikan Epidemiologi) untuk dapat dilakukan tindakan	Jumlah Kasus yang dilakukan Survei Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Laporan
				$\frac{\text{Jumlah Kasus yang berpotensi Wabah}}{\text{Jumlah Kasus yang dilakukan Survei Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah}} \times 100$	

			Penanggulangan suatu Penyakit agar tidak menjadi KLB/Wabah		
4	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Succes Rate Tuberkulosis (TBC)	Jumlah pasien Tuberkulosis semua kasus yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan	Jumlah Penderita TB yang selesai diobati X 100	Laporan
		Persentase orang berisiko dilakukan pemeriksaan RDT	Setiap Ibu Hamil, penderita Tuberkulosis, dan kelompok berisiko lainnya (Penjaja seks, Transgender/Waria, Homoseksual, Pengguna Napza suntik, warga binaan Pemasarakatan) dilakukan Pemeriksaan Skrining RDT HIV	Jumlah Penderita TB yang diobati	Laporan
				Jumlah orang berisiko HIV dilakukan pemeriksaan RDT X 100	
				Jumlah orang berisiko HIV	

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 2 Tugas pokok : membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan kesehatan olahraga
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  - 2) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  - 3) pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian penyakit tidak menular;
  - 4) pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian penyakit tidak menular meliputi : Penyakit Tidak Menular, Kesehatan jiwa dan Kesehatan olahraga;
  - 5) pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan kesehatan olah raga;
  - 6) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan kesehatan olah raga;
  - 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Setiap Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di FKTP dengan menggunakan kartu Carta	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Laporan
2	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Puskesmas dengan ceklist program 80% dilaksanakan dengan benar	Setiap Pemegang program PTM yang dilaksanakan monev mendapatkan nilai didaftar ceklis 80%	Jumlah Puskesmas dengan ceklist program 80% dilaksanakan dengan benar	Laporan



- 1 Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan
- 2 Tugas pokok : membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan;
  - 2) pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di seksi Kesehatan Lingkungan;
  - 3) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penyehatan lingkungan;
  - 4) pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi : Pengawasan Kualitas Air, Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU), Pengawasan Tempat Pengolahan makanan (TPM), Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Inspeksi Sanitasi, Pemantauan Jentik Berkala (PJB), program Klinik Sanitasi dan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah (keracunan makanan dan pestisida);
  - 5) pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan;
  - 6) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan; dan
  - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Desa Melaksanakan STBM	Persentase desa melaksanakan STBM	Desa melaksanakan STBM adalah desa yang sudah melaksanakan pemicuan STBM, pendampingan pasca pemicuan dan / atau verifikasi desa ODF.	$\frac{\text{Jumlah desa atau yang melaksanakan STBM}}{\text{Jumlah semua desa atau kelurahan yang ada}} \times 100\%$	Laporan
2	Monev Puskesmas / RS	Persentase puskesmas /RS dengan ceklist 80% jawaban benar	Puskesmas/RS dengan ceklist 80% dilaksanakan benar adalah puskesmas / RS yang hasil monitoring dan evaluasi dengan kriteria jawaban Ya 80% benar	$\frac{\text{Jumlah puskesmas atau rumah sakit yang dilakukan monev}}{\text{jumlah puskesmas atau rumah sakit yang ada}} \times 100\%$	- Laporan - Daftar Tilik
3	Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dilakukan pengawasan/pemeriksaan	Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan adalah tempat pengolahan makanan yang memiliki sertifikat laik hygiene dilakukan pengawasan dan pembinaan.	$\frac{\text{Jumlah TPM yang bersertifikat LHS dilakukan pengawasan}}{\text{jumlah TPM yang memiliki sertifikat LHS}} \times 100\%$	- Laporan - Sertifikat Laik Higiene

4	Kecamatan dengan Desa <i>Open Defecation Free/Stop</i> Buang Air Besar Sembarangan	Jumlah Kecamatan dengan 1 desa ODF	Kecamatan dengan desa ODF adalah Kecamatan dengan desa yang sudah dilakukan verifikasi desa ODF yang memiliki kriteria yaitu menggunakan dan memiliki akses sarana jamban sehat 100%.	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan dengan 1 desa yang dilakukan verifikasi desa ODF}}{\text{jumlah Kecamatan yang ada}} \times 100\%$	Laporan BA Verifikasi
---	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Pelayanan Kesehatan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional;
  - 2) menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan Kesehatan Tradisional;
  - 3) pelayanan perizinan klinik kesehatan dan pengobatan tradisional;
  - 4) penyelenggaraan upaya kesehatan primer meliputi pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil Pedalaman dan Kepulauan (DTPK), sunatan massal, algoritma klinik, dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PerKesMas);
  - 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
  - 6) fasilitasi penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan mutu puskesmas;
  - 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan primer dan Tradisional; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksanannya Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	- Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan esensial dinilai berdasarkan indikator hasil penilaian kinerja puskesmas dengan kategori Baik dalam rangka untuk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan ceklist program 80\% dilaksanakan dengan benar}}{\text{Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$	Laporan

			<p>mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan Promosi kesehatan</li><li>b. Pelayanan Kesehatan lingkungan</li><li>c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;</li><li>d. pelayanan gizi; dan</li><li>e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.</li></ul> <p>dari 4 (empat) indikator Penilaian kinerja Puskesmas yaitu, Manajemen, Mutu Pelayanan, Upaya pokok dan Upaya Pengembangan, apabila 2 (dua) indikator tersebut masuk dalam Kategori</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	<p>Presentase Puskesmas Yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional terhadap masyarakat dengan indikator sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional.</li> <li>2. Puskesmas Yang melakukan Asuhan Mandiri Kesehatan tradisional ramuan dan ketrampilan Akrapesur.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional}}{\text{Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$	Laporan

	Meningkatnya jumlah Puskesmas yang siap diakreditasi	Jumlah Puskesmas yg siap diakreditasi	Jumlah semua Puskesmas yang mendapatkan pendampingan Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang siap diakreditasi	Hasil Pendampingan dan Self Assasment
	Meningkatnya jumlah Puskesmas yang siap di survey	Jumlah Puskesmas yg siap disurvey	Jumlah Puskesmas yang siap di survey Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yg siap disurvey	Laporan Surveyor

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus
- 2 Tugas pokok : membantu Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus dan penanganan masalah kesehatan akibat bencana
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
  - 2) penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, dan penanganan masalah kesehatan akibat bencana ;
  - 3) penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan;
  - 4) fasilitasi registrasi, akreditasi, dan penetapan rumah sakit umum daerah kabupaten;
  - 5) pelayanan perizinan Rumah Sakit kelas C dan D;
  - 6) penyelenggaraan upaya kesehatan khusus, yang meliputi : kesehatan haji, kesehatan gigi, mulut dan mata, (pelayanan operasi bibir sumbing dan operasi katarak), sunatan massal, kesehatan mata, dan pelayanan kesehatan penyandang cacat;
  - 7) penyelenggaraan pelayanan kesehatan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa;
  - 8) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus; dan
  - 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat khusus dan bhakti sosial	Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada hari-hari besar, bencana serta pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji dan bakti sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan khusus	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan khusus}}{\text{Jumlah Sasaran masyarakat yang mendapatkan pelayanan khusus}} \times 100$	Laporan
2	Terlaksananya monitoring puskesmas	Puskesmas dan RS yang melaksanakan Program sesuai standar dengan nilai checklist minimal 80%	Jumlah puskesmas dan RS dengan nilai checklist pelaksanaan program 80 % benar	Jumlah puskesmas dengan nilai checklist pelaksanaan program 80 % benar	Laporan
3	Meningkatnya jumlah Rumah Sakit yang siap Akreditasi	Rumah Sakit yang sudah terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang siap Akreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang siap Akreditasi	Hasil Pendampingan

- 1 Jabatan : Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 2 Tugas pokok : membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- 3 Fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  - 2) penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  - 3) penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pertanggungjawaban pembiayaan dan jaminan kesehatan;
  - 4) pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan, yang meliputi : Jaminan Persalinan (JamPersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peserta Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan Pusat, Retribusi Pelayanan Pasien Umum dan Rumah Sakit;
  - 5) pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
  - 6) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
  - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terbayarnya klaim pelayanan kesehatan	Dihitung berdasarkan jumlah pembayaran klaim pelayanan kesehatan Dana Non Kapitasi Dan Retribusi dibagi jumlah Dana Non Kapitasi Dan Retribusi pelayanan kesehatan yang di klaim oleh FKTP	Presentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan	Jumlah pembayaran klaim pelayanan kesehatan X 100	Laporan
				Jumlah klaim pelayanan kesehatan	
2	Terlaksananya Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan program pembiayaan kesehatan 80% benar dibagi jumlah keseluruhan puskesmas	Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan program pembiayaan kesehatan 80% benar	Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan program pembiayaan kesehatan 80% benar	Laporan
3	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan dan kapitasi JKN oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Dihitung berdasarkan Dana kapitasi yang diterima FKTP dimanfaatkan kembali oleh FKTP secara efektif dan efisien	Persentase dana kapitasi JKN yang dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP	Jumlah dana kapitasi JKN yang dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP X 100	Laporan
				Jumlah dana kapitasi JKN	
4	Memaksimalkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Dihitung berdasarkan jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dibagi sasaran keluarga pada suatu wilayah	Persentase Kunjungan Keluarga	Jumlah Kunjungan Keluarga X 100	Laporan
				Jumlah Sasaran Keluarga	
5	Mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Dihitung berdasarkan Jumlah Keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat dibagi sasaran keluarga pada suatu wilayah	Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat X 100	Laporan
				Jumlah sasaran keluarga	

6	Meningkatnya Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal	pengelolaan keuangan dana BOK yang diterima Puskesmas dengan laporan keuangan dana BOK yang tepat waktu, lengkap dan benar	Persentase puskesmas dengan laporan keuangan BOK yang tepat waktu, lengkap dan benar	Jumlah puskesmas dengan laporan keuangan BOK yang tepat waktu, lengkap dan benar	Laporan
				X 100	
7	Tersedianya pembiayaan persalinan bagi ibu hamil tidak mampu	Dinilai dari jumlah persalinan di Fasilitas kesehatan dibagi jumlah persalinan secara keseluruhan pada suatu wilayah	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan	Laporan
				X 100	
				Jumlah persalinan	



KABUPATEN KAPUAS HULU  
 KEPALA DINAS KESEHATAN

*(Handwritten Signature)*  
 Abang Muhammad Nasir, S.Sos  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630602 198603 1 018